



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Edisi 2 Tahun 2020

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI DI TENGAH PANDEMI

4

MELALUI INSTRUKSI
MENTERI PUPR:
HAK-HAK PEKERJA KONSTRUKSI
TETAP DIJAMIN
DITENGAH PANDEMI COVID-19

16

WISMA ATLET KEMAYORAN,
MENJADI RS DARURAT
COVID-19





16

Wisma Atlet Kemayoran, Menjadi RS Darurat COVID-19

Sejak diumumkan pasien positif Covid-19 di Indonesia awal Maret lalu, jumlah pasien hingga saat ini telah mencapai angka 3.000 orang lebih.

berita utama

04 Melalui instruksi Menteri PUPR: Hak-Hak Pekerja Konstruksi Tetap Dijamin Ditengah Pandemi COVID-19

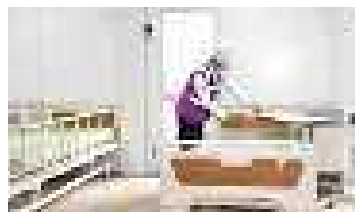
07 Jasa Konstruksi Di Tengah Pandemi

10 Tantangan Sektor Konstruksi Di Balik Pandemi COVID-19

liputan khusus

13 Ini Harapan Pekerja dan Petugas Kebersihan di RS Darurat COVID-19

18 Kementerian PUPR Bangun Rumah Sakit di Pulau Galang



berita terkini

20 Kementerian PUPR Bekerjasama Dengan Kemendikbud Melaksanakan Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Calon Ahli Muda Fresh Graduate Sarjana Dan Diploma

23 Upaya Peningkatan Pemanfaatan Mobile Training Unit Dalam Rangka Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil

26 Kunci Menangkan Persaingan : Lebih Baik, Lebih Murah Dan Lebih Cepat

28 Hambatan dan Tantangan dalam Pembinaan Jasa Konstruksi bagi Pemerintah Daerah



Games

30 Tebak Nama-nama Item Safety First Construction

Q & A

31 Kuisisioner Tentang Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi



DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Pengadaan Barang dan Jasa; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Dirketur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** M. Aldenny. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi. **Redaksi Sekretariat:** Galuh Shinta Dewi, Teni Agustina, ST Ngafiyah, Siti Afrida, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI DI TENGAH PANDEMI

Tidak ada yang bisa memprediksi kapan musibah akan datang, awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan luapan banjir yang melanda kota Jakarta. Belum hilang dampak banjir, kini Indonesia bahkan seluruh dunia dikejutkan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19. Covid-19 ini berawal dari Wuhan China dan dilaporkan puluhan ribu warga Tiongkok meninggal dan di rawat di rumah sakit. Bahkan untuk menanggulangi banyaknya pasien yang terinfeksi virus corona ini pemerintah Tiongkok membangun rumah sakit khusus corona dalam waktu satu minggu yang dapat menampung 1.000 tempat tidur pasien.

Indonesia menyatakan ada pasien positif terinfeksi pada awal Maret 2020, sejak saat ini jumlah pasien positif dan terinfeksi virus corona ini terus bertambah. Bahkan hingga 4.000 lebih pasien positif (berdasarkan data per tanggal 15/04), sehingga pemerintah Indonesia pun berinisiatif mengubah fungsi Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat dan membangun Rumah Sakit Khusus Covid-19 Pulau Galang, di Kepulauan Riau.

Status Darurat Nasional pun diberlakukan, sehingga seluruh sektor saling membantu pada proses penanggulangan pasien virus corona ini. Kementerian PUPR berperan dalam membangun Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau dan memperbaiki fasilitas Wisma Atlet Kemayoran yang dialihfungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat di Jakarta. 7 dari 10 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran di fungsikan sebagai Rumah Sakit Pasien yang terinfeksi dengan gejala ringan dan Penginapan tenaga medis yang bertugas.

Bukan hanya para tenaga medis yang berjuang digarda depan, para Sumber Daya Manusia Konstruksi juga berperan banyak sebagai pendukung penanganan pasien terinfeksi Covid-19. Dengan sigap dalam hitungan hari, menyelesaikan berbagai perbaikan dan pembangunan Rumah Sakit Darurat khusus Covid-19 di Jakarta dan Kepulauan Riau. Meski tidak bisa mengenakan seragam Putih bak seorang dokter atau perawat para Pekerja Konstruksi ini tetap semangat menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar para pasien covid-19 segera mendapat penanganan.

Meski demikian, Hak-hak para pekerja juga tetap dijamin melalui INSTRUKSI MENTERI PUPR (InME n) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020. Sehingga penghentian sementara pekerjaan konstruksi akibat pandemi ini akan tetap menjamin tidak melepaskan hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa terhadap kompensasi biaya upah para Tenaga Kerja Konstruksi.

Pandemi ini membuat putaran roda kita melambat sementara, melihat sekeliling secara jeli, menemukan jalan dan anjang-ancang untuk mengayuh kembali. Apapun yang terjadi saat pandemi ini adalah titik balik kita semua untuk berkontemplasi, pun berdiam sejenak dan mengasah kembali sehingga muncul inovasi untuk bertahan menghadapi wabah ini. Seperti ujian, kita akan naik ke kelas berikutnya bila kita berhasil melaluinya. Terdengar melankolis, tapi optimis bahwa seluruh sektor bisa melewatinya, khususnya sektor konstruksi.

MELALUI INSTRUKSI MENTERI PUPR: HAK-HAK PEKERJA KONSTRUKSI TETAP DIJAMIN DITENGAH PANDEMI COVID-19



Di tengah merebaknya pandemi Virus COVID-19 (Corona), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.

LANGKAH pencegahan COVID-19 telah dilaksanakan Kementerian PUPR salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020.

Instruksi tersebut sebagai bagian dari tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 terkait upaya

pencegahan COVID-19 dan adanya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun poin-poin penting yang diinstruksikan Menteri PUPR dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di tengah merebaknya Virus COVID-19, yakni:

Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan jika teridentifikasi: (i) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; (ii) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau (iii) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

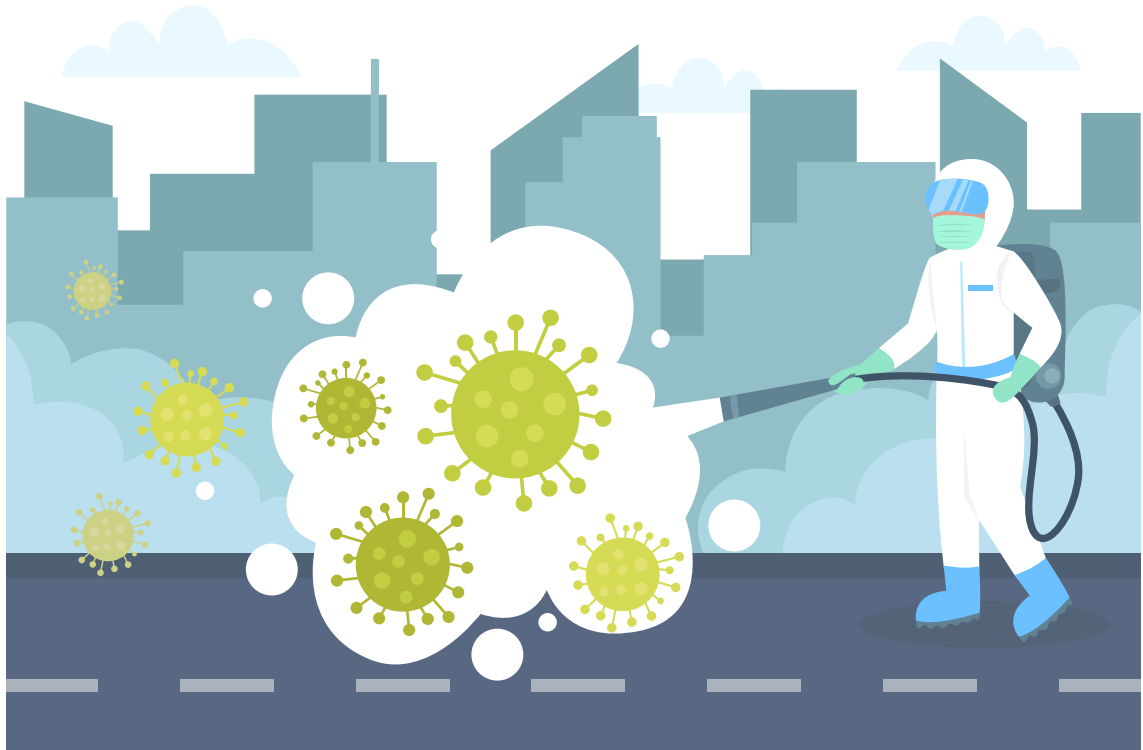
Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara tersebut harus mengacu pada Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak



Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya,

upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.

Hal ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.



Perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka penanganan COVID-19, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Secara garis besar, skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Instruksi Menteri mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19;
- 2) Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan

- 3) Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
- 4) Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan

Sedangkan upaya tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

- 1) Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
- 2) Mekanisme Pergantian Spesifikasi
- 3) Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/ Produsen/Pemasok

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi, lebih lanjut diatur mengenai kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa

konstruksi yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Skema Protokol Pencegahan COVID-19 pada Instruksi Menteri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi.

Diharapkan dengan adanya Instruksi Menteri ini, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.





JASA KONSTRUKSI DITENGAH PANDEMI

Oleh: Meylina Hasbullah

Beberapa bulan terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam pola hidup dan kebiasaan masyarakat dunia.



HIMBAUAN untuk rajin mencuci tangan, pemakaian *masker*, *physical distancing*, menjaga imunitas tubuh, *just stay home* tak henti-hentinya dikumandangkan sebagai bagian dari perlawanan umat manusia terhadap covid-19. Wabah *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sudah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi tanggal 11 Maret 2020. Pandemi yang didefinisikan sebagai epidemi atau penyebaran penyakit

tertentu yang terjadi secara global di banyak negara ini, telah menjangkiti lebih dari 1.6 juta manusia dengan korban jiwa di atas 95 ribu. Tercatat hingga awal April 2020, negara-negara di USA, Italia, Spanyol, Jerman dan Prancis menjadi lokasi pandemi dengan jumlah terbanyak. China sebagai negara awal tempat wabah terjadi pada akhir tahun 2019, mulai membuka negaranya, setelah sempat beberapa bulan ditutup untuk mengendalikan covid-19.

Indonesia turut serta melakukan langkah-langkah penanggulangan wabah. Sejak ditemukan kasus positif pertama dalam negeri di awal Maret 2020, terhitung ribuan warga telah terjangkau.

Ketidakpastian situasi global maupun domestik akibat wabah, melambatkan pembangunan di seluruh dunia dan mengancam pertumbuhan ekonomi. Sektor Jasa Konstruksi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Kebijakan yang dikeluarkan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan demi percepatan penanganan covid-19, mengatur peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi

Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* mengeluarkan kebijakan ekonomi sebagai antisipasi dampak pandemi.

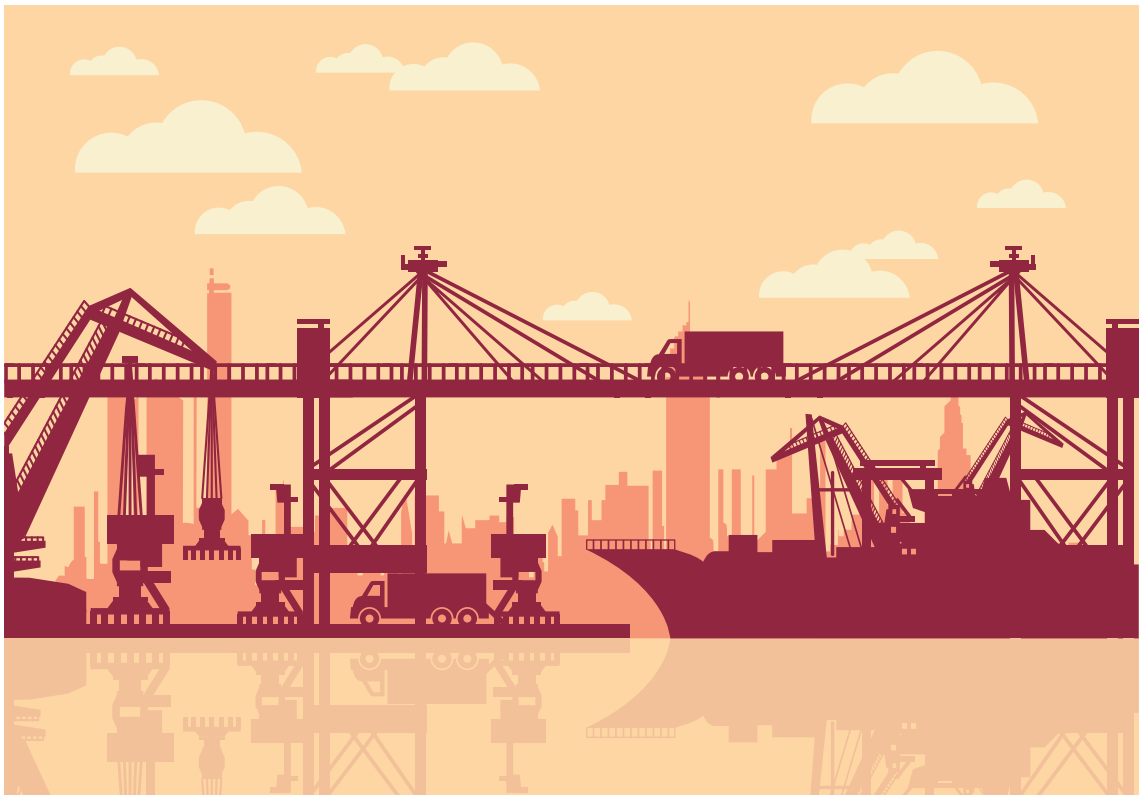
Secara khusus, Inpres tersebut memberi instruksi ke Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait kebijakan di atas. Tiap kementerian dan lembaga harus merombak rencana, anggaran dan *output* mereka dan menyelaraskannya lintas sektoral. Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukannya.

Sederet kebijakan yang diambil pemerintah, diantaranya: memangkas rencana belanja yang

tidak prioritas di APBN maupun APBD, *Refocusing* kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19, menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah, memperbanyak program padat karya tunai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, memberi tambahan pada pemegang kartu sembako, mempercepat implementasi kartu pra kerja, menangani pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh pekerja di industri pengolahan, memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta memberikan stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi.

Covid-19 masih menjadi masalah utama di seluruh dunia. Di Indonesia sejumlah perusahaan





telah menerapkan *Work From Home (WFH)* untuk mencegah penularan virus di masyarakat. Melalui Kementerian PAN RB, di bulan Maret 2020 telah ditetapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan sistem kerja diatur kemudian di unit-unit organisasi.

WFH atau bekerja dari rumah, juga diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Karyawan tidak perlu datang ke kantor dan bisa bekerja di tempat tinggalnya, agar risiko penularan virus di masyarakat dapat berkurang dan memutus mata rantai penyebaran. WFH selaras dengan PSBB sebagai cara yang dilakukan kepada masyarakat

untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan dan pertemuan yang melibatkan banyak orang, menjaga jarak antar manusia.

Pembinaan Jasa Konstruksi terus dilakukan di tengah ancaman covid-19, menurunnya perekonomian nasional, perubahan organisasi beserta tugas dan fungsi. *Stakeholder* jasa konstruksi merasakan dampak dari menurunnya pembangunan dan fokus nasional terhadap penanggulangan wabah.

Koordinasi, pembagian tugas, rapat *online* semakin marak dilakukan. Berbagai aplikasi yang memungkinkan *video conference*

untuk berkomunikasi seperti Whatsapp, Zoom, Google Hangouts Meet, Facetime, GoToMeeting, Skype, Cisco Webex, Microsoft Teams dan Slack marak digunakan dan meraup keuntungan di tengah pandemi.

Adaptasi dengan perubahan yang terjadi pun dilakukan. Industri tekstil beralih produksi *masker* dan Alat Pelindung Diri (APD), swadaya masyarakat membuat disinfektan, ojek *online* yang beralih mengantar barang dan makanan. Bagaimanapun juga, pola kehidupan masyarakat sedang berubah drastis dan belum diketahui akan sampai berapa lama. Namun, badai pasti berlalu. (***)

TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI BALIK PANDEMI COVID-19

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng

Dalam rentang periode triwulan pertama Tahun 2020 ini, hampir seluruh headline surat kabar maupun social media dipenuhi dengan berita tentang wabah Covid-19.



DIAWALI dari Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok, hingga hampir ke seluruh benua. Tak hanya di Cina, virus ini menyebar begitu cepat ke negara-negara tetangga kita. Saking cepat penyebarannya, hingga negara kita pun tak luput dari serangan virus Covid-19 ini. Di Indonesia, tak kurang dari 1500 orang terserang oleh virus ini, bahkan diprediksi angka ini akan terus naik.

Dampak serangan virus yang tak kasat mata ini begitu digdaya. Bahkan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pandemi ini adalah ujian terbesar bagi seluruh negara setelah Perang Dunia II. Sujiwo Tejo, seorang budayawan Jawa, menyebutkan bahwa pandemi ini adalah pageblug bagi bangsa kita. Pandemi ini secara langsung membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya menyerang kesehatan kita, namun

dampaknya begitu *massive* hampir ke seluruh sektor. Pandemi ini menyebabkan gangguan di sektor pariwisata yang lesu, sosial ekonomi global yang begitu parah, penundaan berbagai event besar, pembatasan mobilisasi, serta mengakibatkan kekhawatiran terhadap pasokan kebutuhan bahan pokok.

Tak luput pula dari ganasnya pandemi, dampak virus Covid-19 juga dirasakan oleh sektor konstruksi. Proyek konstruksi yang merupakan sektor padat karya dengan intensitas interaksi lapangan yang sangat tinggi dinilai rentan terpapar virus ini. Pekerjaan dilaksanakan secara langsung di lapangan dan dilaksanakan secara team membuat para pekerja khawatir. Hampir kecil kemungkinan pembangunan infrastruktur dilakukan secara individu apalagi secara virtual. Wajar bila beberapa

penyedia jasa memiliki kekhawatiran akan terpapar virus ini.

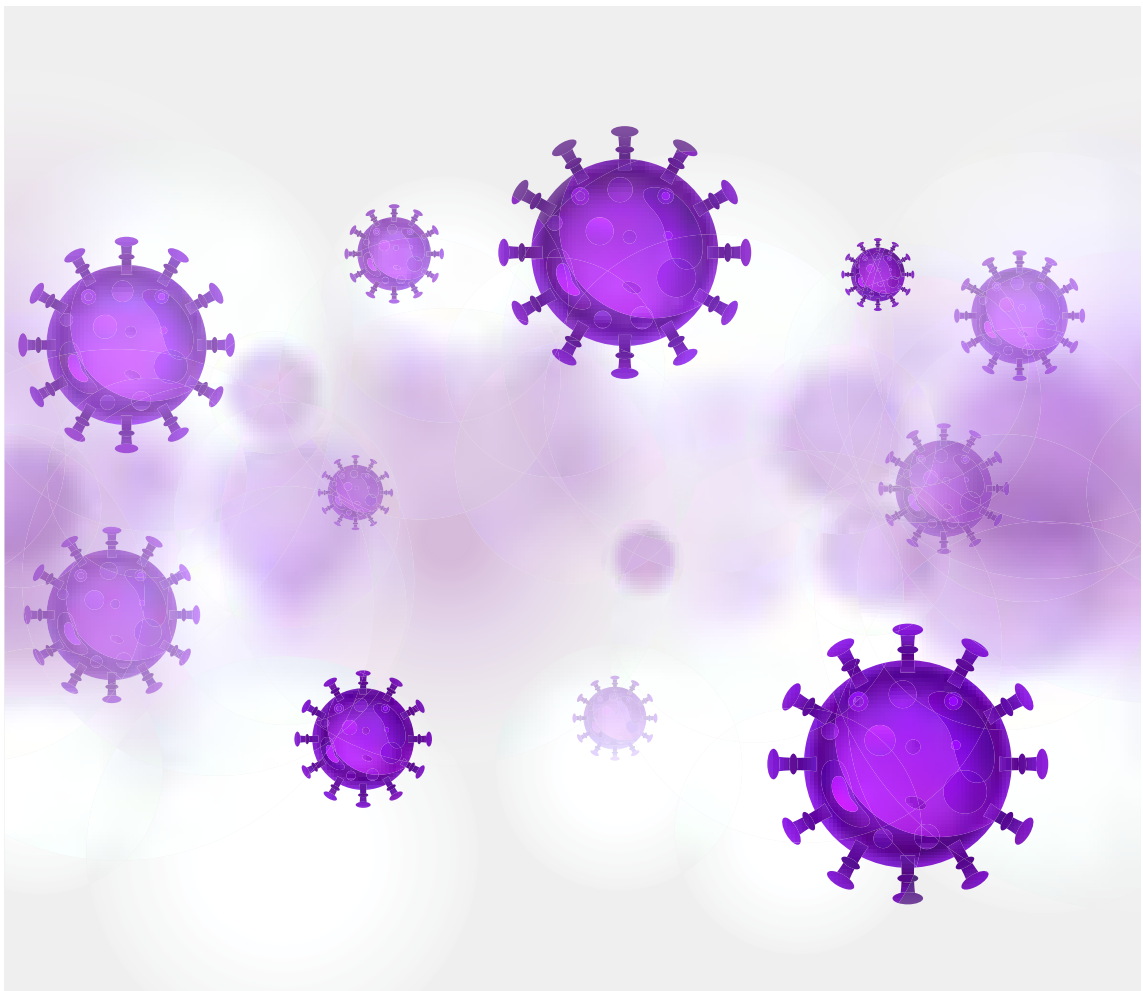
Menanggapi hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengeluarkan Instruksi Menteri No.02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 27 Maret 2020 yang lalu. Hal ini dibuat dalam rangka melindungi para tenaga kerja dalam rangka melaksanakan pekerjaan konstruksi. Telah dikonfirmasi oleh penulis, Hariyadi, salah seorang *Project Manager* salah satu BUMN di Surabaya, menyebutkan bahwa saat ini diproyeknya sedang dibentuk divisi penanganan Covid-19 dalam upaya melindungi seluruh tenaga kerja dari paparan virus corona ini.

Beliau menambahkan bahwa telah menyiapkan masker untuk seluruh pekerja. Di direksi *keet*, bedeng pekerja, titik kumpul, maupun pintu akses disediakan *hand sanitizer*. Selain itu juga sudah pesankan *disinfectant chamber* yang nanti akan dipasang di pintu masuk. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada seluruh tenaga kerja konstruksi dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi.

Lalu apakah gebukan pandemi berhenti disini?! Rasa-rasanya tidak. Dampak pandemi baik langsung maupun tak langsung tak terelakkan lagi terkait ketersediaan pasokan bahan baku. Sekali lagi, rantai pasok konstruksi harus berjuang menghadapi serangan gelombang

pandemi. Sejumlah bahan baku impor dari negara terjangkit pandemi pun terkena dampak, salah satunya China. Mulai dari menipisnya pasokan, sulitnya mendapatkan bahan baku, walaupun tersedia terjadi kenaikan harga bahan yang signifikan. "Saat ini pabrik masih punya stok pasokan bahan, namun kalau lama kelamaan begini, kan deg-degan juga. Udah mulai susah cari bahannya. Produksi juga ngga berani gede" tutur Yuliana, manajer perusahaan baja di Jakarta. Tak elak, disrupsi bahan baku akibat pandemi terhadap rantai pasok konstruksi akan terjadi.

Kendala lain yang ditemui adalah susahnya distribusi arus pasokan bahan baku. Adanya Covid-19 *outbreak* ini, lalu lintas distribusi





logistik bahan baku menjadi terbatas. Pembatasan aktivitas logistik secara langsung memberikan kontribusi dalam kenaikan ongkos distribusi barang. Sudah tentu, akibat harga bahan baku yang mahal, ditambah lagi biaya distribusi mengalami kenaikan adalah pukulan berat bagi pelaku usaha konstruksi. Keterbatasan pasokan bahan baku dan kondisi distribusi bahan baku seperti ini perlu diwaspadai, terlebih lagi bila pandemi Corona ini berlangsung cukup lama. Bisa dimungkinkan kesulitan pasokan bahan baku akan mengancam produksi material. Penurunan kapasitas produksi tak terelakkan lagi, paling buruknya pemenuhan material konstruksi terhambat. Hal ini yang benar-benar harus dihindari.

Menghadapi kondisi ini para pelaku usaha konstruksi harus memutar otak agar kebutuhan material terpenuhi. Mungkin sekali, adanya pandemi ini mendorong pelaku usaha konstruksi untuk berinovasi dengan melakukan substitusi bahan baku dengan

meminimalisir pasokan bahan baku dari luar dan mengoptimalkan bahan baku lokal. Substitusi bahan baku ini tentu saja tidak mudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu dan perlu cara, namun bukan berarti tidak mungkin. Perlu dilakukan pengembangan atau riset yang aplikatif untuk mendukung substitusi bahan baku ini sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Tentu saja hal ini dibarengi dengan mutu yang sesuai standar tanpa mengurangi kualitas produk.

Adanya kondisi pandemi ini, memungkinkan para pelaku usaha untuk menekan angka impor dan meningkatkan pemanfaatan material dari dalam negeri. Sejatinnya, bila inovasi terkait substitusi ini dapat berjalan, ini adalah kesempatan para pelaku usaha untuk melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan jalan terbuka menuju swasembada bahan baku dalam negeri. Kondisi ini dipertegas dengan regulasi dari pemerintah bahwa pemanfaatan

material konstruksi harus menggunakan material dalam negeri. Dengan adanya kebijakan seperti ini, swasembada rantai pasok konstruksi dapat dilaksanakan, ketergantungan impor dapat dikurangi, pasokan terpenuhi, sehingga target pembangunan infrastruktur tercapai. Sekali lagi, kemandirian rantai pasok yang selama ini dicita-citakan dapat tercapai.

Pandemi ini membuat putaran roda kita melambat sementara, melihat sekeliling secara jeli, menemukan jalan dan anjang-anjang untuk mengayuh kembali. Apapun yang terjadi saat pandemi ini adalah titik balik kita semua untuk berkontemplasi, pun berdiam sejenak dan mengasah kembali sehingga muncul inovasi untuk bertahan menghadapi wabah ini. Seperti ujian, kita akan naik ke kelas berikutnya bila kita berhasil melaluinya. Terdengar melankolis, tapi optimis bahwa seluruh sektor bisa melewatinya, khususnya sektor konstruksi. *Stay safe, stay healthy!*

INI HARAPAN PEKERJA DAN PETUGAS KEBERSIHAN DI RS DARURAT COVID-19

Oleh: Ristyan Mega Putra

Suasana mendung setelah hujan turun masih menyelimuti Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Tampak sejumlah pekerja dengan mengenakan rompi jaring berwarna orange dan helm proyek sedang beristirahat melepaskan penat setelah bekerja.



PELUH mengingat di kening mereka masih terlihat ketika mereka berbincang-bincang membicarakan hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan sejak malam hari. Ya, mereka adalah para pekerja yang turut andil dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Salah seorang pekerja bernama Mulyadi mengatakan, tak pernah terbersit sedikit pun dipikirkannya bahwa dia bersama ratusan pekerja lainnya bisa ikut membangun RS tersebut. Mereka sehari-hari bekerja di lapangan sesuai arahan mandor.

Ketika mereka diperintahkan untuk membersihkan Wisma Atlet Kemayoran sejak Kamis tanggal 19 Maret 2020, mereka pun "manut" saja dengan perintah yang diberikan. Pekerjaannya pun dimulai dengan membersihkan ruangan yang ada. Kemudian membongkar dinding jika memang perlu dibongkar serta mengecat dinding yang kusam agar terlihat bersih kembali. Tak hanya membongkar, tapi mereka pun sigap untuk membangun ruangan-ruangan baru sesuai dengan denah ruangan yang diberikan kepada mereka.

Tenggat waktu yang diberikan kepada para pekerja tersebut sangatlah pendek. Mereka diberikan deadline hanya sekitar tiga hari mulai Kamis tanggal 19 Maret 2020 sampai Sabtu tanggal 21 Maret 2020. Hal itu dikarenakan pada hari Sabtu malam hingga Minggu siang seluruh peralatan medis yang diperlukan untuk penanganan

pasien Covid-19 sudah tiba dan harus segera di instalasi. Sedangkan hari Minggu mereka tinggal melakukan "finishing touch" saja.

"Alhamdulillah akhirnya selesai semua pekerjaannya di sini," ujar Nadhor, salah seorang pekerja di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Hal senada dikatakan oleh Mulyadi, pekerja asal Purwodadi, Jawa Tengah yang ikut mengerjakan proyek pembangunan RS tersebut. Dirinya mengatakan ikut senang dan bangga bisa membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 meskipun hanya sebagai pekerja bangunan.

"Saya merasa senang dan bangga bisa ikut membantu pembangunan RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini. Semoga RS ini bermanfaat buat orang banyak," ujarnya diamini rekan-rekan pekerja lainnya.

Meskipun bekerja dengan sistem shift, Mulyadi mengatakan dirinya dan teman-temannya kadang harus lembur menyelesaikan pekerjaan. Tak tanggung-tanggung, jam kerjanya pun ditambah agar RS tersebut dapat segera dimanfaatkan.

Meskipun saat ini Covid-19 menjadi salah satu virus yang berbahaya bagi manusia, namun Mulyadi dan kawan-kawannya tetap bekerja sesuai pekerjaannya yang

diperintahkan. “Saya dan teman-teman sudah pasrah sama takdir dan ketentuan dari Allah. Yang penting pekerjaan selesai dan semoga bermanfaat bagi para pasien yang dirawat di sini,” harapnya.

Sementara itu, Aprija salah seorang petugas kebersihan di *Tower 7* Wisma Atlet Kemayoran mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman juga berusaha membersihkan ruangan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sejumlah alat kebersihan seperti sapu, lap pel, kain digunakan untuk membersihkan debu yang ada di lantai serta *meubelair* yang ada di dalam ruang rawat pasien.

“Alhamdulillah saya senang bisa ikut membantu. Semoga pasien yang dirawat di sini bisa sembuh total,” harapnya.

Menurut Bu Mega, petugas kebersihan lainnya, pekerjaan pembersihan ruangan dilaksanakan dengan sistem *shift* yakni delapan jam kerja untuk masing-masing orang. Dirinya bersama petugas kebersihan lainnya yang bernama Jeklin memasuki satu demi satu ruangan yang ada di tiap lantai tersebut.

“Setiap ruangan yang ada harus selalu bersih. Jadi kalau bersih

pasiennya juga senang dan bisa lekas sehat kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa RS Darurat Covid-19 besok saat ini masih dalam tahap uji coba untuk menerima pasien. Sedangkan operasional RS ini akan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Semua pekerjaan sudah selesai 100 persen. RS di Wisma Atlet Kemayoran ini siap untuk dioperasikan menunggu komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” terangnya.





Pihak Kementerian PUPR, kata Basuki, dalam mendukung pembangunan RS Darurat Covid-19 setidaknya telah melakukan tiga komponen pekerjaan. Pertama adalah membersihkan semua sudut ruangan yang ada karena bangunan ini sudah lama tidak digunakan setelah Asian Games 2018.

Pekerjaan kedua adalah berkoordinasi dengan BNPB untuk menyempromot ruangan baik di bagian luar maupun di dalam ruangan dengan desinfektan. Kemudian pekerjaan yang ketiga adalah memperbaiki ruangan yang dibutuhkan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Sebelumnya banyak ruangan di sini yang tidak ada sekatnya. Beberapa ruangan yang sebelumnya terkotak-kotak juga di jebol agar ruangan yang ada memenuhi kebutuhan tim paramedis seperti ruang radiologi, laboratorium dan farmasi serta ICU,” terangnya.



WISMA ATLET KEMAYORAN, MENJADI RS DARURAT COVID-19

Oleh: Indri Eka Lestari

Sejak diumumkan pasien positif Covid-19 di Indonesia awal Maret lalu, jumlah pasien hingga saat ini telah mencapai angka 3.000 orang lebih.

UNTUK mengantisipasi kapasitas rumah sakit yang terbatas Pemerintah mengubah fungsi Wisma Atlet Kemayoran, yang sebelumnya digunakan untuk keperluan penginapan para Atlet dan rombongan peserta dalam penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 lalu ini, terdiri dari 10 tower. Dari 10 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower yang difungsikan sebagai RS Darurat yaitu tower 1, 3, 6 dan 7 yang semuanya berada di Blok D10.

Tower 6 seluruhnya mulai lantai 1 hingga 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. Kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang. Satu kamar diperkirakan dapat menampung dua hingga tiga orang pasien. Adapun tower 7 akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai IGD, lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk ruang *refreshing*. Sedangkan lantai 4 - 24 akan digunakan

sebagai ruang rawat inap pasien. Kapasitas di tower 7 adalah 886 unit dengan kapasitas ruang rawat maksimum adalah 2.458 pasien.

Untuk dokter dan petugas medis akan menggunakan Tower 1 lantai 1 - 24 dengan kapasitas 650 unit dan dapat menampung maksimum 1.750 orang. Sedangkan Tower 3 lantai 1 - 24 direncanakan untuk Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Jumlah unit yang tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung maksimal 1.750 orang.

Kondisi umum wisma atlet sangat baik, hanya beberapa perbaikan dan perapihan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat Penanganan COVID-19 dan saat ini sudah 100% siap untuk digunakan. Perbaikan dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden RI Joko Widodo

atas permintaan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terdapat tiga komponen pekerjaan yang dilakukan. Pertama pembersihan ruangan karena sudah lama tidak dipakai, termasuk penyemprotan disinfektan kemarin sore, 100% sudah selesai. Kemudian modifikasi perbaikan sedikit di lantai 1,2, dan 3 pada tower 7 yang akan dimanfaatkan sebagai RS Darurat dilengkapi dengan ruang laboratorium, farmasi, radiologi, dan ICU semua sudah siap 100%. Sementara instalasi/pemasangan peralatan medis yang semuanya sudah masuk ke Wisma Atlet Kemayoran.

Semua protokol terkait pelayanan kesehatan, akan diatur oleh Kementerian Kesehatan dengan operasionalnya akan dibantu oleh TNI, Kepolisian, dan relawan, di bawah komando dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sedangkan untuk bantuan alat-alat kesehatan akan dikoordinir oleh Kementerian BUMN. Jadi ini adalah bentuk sinergi Pemerintah untuk penanganan COVID-19.

Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan, Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS Darurat COVID-19 diperuntukkan untuk pasien positif virus Corona yang kondisinya sakit ringan. Hal itu dilakukan agar rumah sakit rujukan Corona bisa fokus untuk menangani pasien COVID-19 yang kondisinya sakit berat. Rumah sakit yang akan menentukan pasien mana yang akan dirawat di Wisma Atlet agar pasien positif COVID-19 dengan sakit ringan tidak menyebabkan penularan baru. Selain itu, tenaga medis sudah siap semua.

Sementara itu, Selasa (24/03) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kesiapan Rumah Sakit (RS) Darurat Penanganan COVID-19 berikut fasilitasnya di Wisma Atlet

Kemayoran. Mengenakan kemeja putih dan masker bedah dan sarung tangan latex. Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo.

"Baru saja tadi saya mengecek kesiapan wisma atlet ini yang akan kita gunakan untuk penanganan pasien virus COVID-19," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan, kapasitas yang mungkin ditampung dalam Wisma Atlet Kemayoran tersebut memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien." terangnya.

Ruangan-ruangan di rumah sakit darurat tersebut telah ditata dengan manajemen yang baik antara ruangan pasien, dokter, serta tim paramedis," saya juga melihat sarana dan prasarana telah siap baik untuk ruangan penanganan pasien, baik ventilator, APD sudah siap" tutur Presiden.

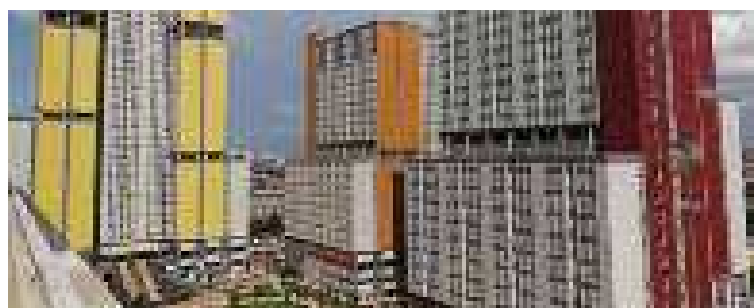
Selain itu, sebagai langkah antisipasi Kementerian PUPR melakukan perapihan 3 tower untuk mendukung penanganan pasien covid-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Ketiga tower yang disiapkan adalah tower 2, 4, dan 5 sehingga jumlahnya ada 7 tower dari 10 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran yang akan digunakan untuk penanganan pasien covid-19.

Tambahan 3 tower tersebut akan digunakan untuk menambah daya

tampung ruang pasien RS Darurat COVID-19 dan menyediakan hunian layak bagi tenaga dokter dan paramedis yang bertugas 24 jam di RS Darurat tersebut. Untuk tower 2 digunakan sebagai hunian tim dokter dan paramedis memiliki 24 lantai dengan jumlah 886 unit. Saat ini telah selesai dilakukan pembersihan dan perbaikan minor pada tower 2. Sedangkan tower 4 dan 5 yang berada di Blok D-10 akan dimanfaatkan untuk menambah ruang isolasi/karantina (rawat inap) bagi pasien dengan masing-masing kapasitas 886 unit.

Kementerian PUPR juga melakukan sejumlah perubahan fungsi bangunan pada tower 6 yang sebelumnya sebagai ruang rawat inap menjadi ruang penanganan. Lantai 1 tower 6 direnovasi untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), lantai 2 ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan lantai 3 ruang pemulihan. Sementara lantai 4-24 tetap digunakan sebagai ruang rawat inap yang pembangunannya memperhatikan tekanan negatif atau *negative pressure* pada ruangan. Total tower 6 memiliki 650 unit.

Sejauh ini berdasarkan data yang dihimpun dari kompas.com, sampai dengan Selasa tanggal 8 April 2020 tercatat sebanyak 527 pasien telah terdaftar pada RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Dari angka tersebut, sebanyak 336 pria dan 191 orang wanita. Dari jumlah 527 pasien tersebut sebanyak 318 pasien positif COVID-19, 59 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 150 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).



Kementerian PUPR Bangun Rumah Sakit di Pulau Galang

Oleh: Indri Eka Lestari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, utamanya COVID-19 (Corona) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

PEMBANGUNAN infrastruktur fasilitas tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan telah siap beroperasi pada Senin (6/4/2020).

Lokasi yang dipilih untuk pembangunan fasilitas tersebut yaitu di eks pengungsi Vietnam dan area pengembangan yang berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadim dan 56 km dari Kota Batam dengan memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar.

Pulau Galang dipilih lantaran cukup strategis dan jauh dari pemukiman masyarakat sehingga risiko penularan sedikit. Selain itu, lokasi yang strategis menjadi salah satu alasan yaitu Bandara Hang Nadim dapat menjangkau pesawat besar, dan lokasinya hanya 15 menit dari bandara. Serta terdapat fasilitas seperti air, listrik, dan utilitas serta bekas rumah sakit yang ada dari bangunan eks camp pengungsi



Vietnam hanya perlu dilakukan sedikit perbaikan dan renovasi.

Semula perbaikan fasilitas ini ditargetkan selesai pada tanggal 28 Maret 2020, namun karena kendala faktor pengiriman barang, termasuk material konstruksi, akibat cuaca buruk, maka target penyelesaian bergeser menjadi tanggal 5 April 2020. Target ini disesuaikan dengan memperhatikan keterlambatan pengiriman material, pemasangan instalasi kesehatan, dan mobilisasi petugas medis.

Pembangunan fasilitas penampungan/observasi/isolasi penyakit menular di Pulau Galang dibagi menjadi 3 Zonasi, yakni Zona A (Renovasi Eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mess petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang dan power house.

Sementara Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, Central Gas Medik, instalasi jenazah, landasan helicopter (*helipad*), dan zona utilitas.

Saat ini terdapat 2 gedung bertingkat 2 berada di Zona B yang terdiri dari fasilitas observasi/penampungan/karantina (termasuk isolasi) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan untuk Non ICU. Total kapasitas Zona B mencapai 360

tempat tidur yang terdiri dari ruang observasi sebanyak 340 tempat tidur dan ruang isolasi sebanyak 20 tempat tidur ICU.

Selain itu di sekitar fasilitas utama juga dilengkapi ruang tindakan, ruang penyimpanan mobile rontgen, ruang laboratorium, dapur, renovasi bangunan eksisting untuk bangunan penunjang, fasilitas air bersih, air limbah, drainase, sampah, dan utilitas lainnya, serta ruang alat kesehatan ruang isolasi dan observasi. Terakhir Zona C adalah untuk tahap berikutnya (menyesuaikan kebutuhan) dengan memanfaatkan cadangan lahan.

Keseluruhan pekerjaan berlangsung dibawah supervisi Balai Prasarana



Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Ditjen Cipta Karya. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, sedangkan konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT Virama Karya.

Pembukaan rumah sakit dilakukan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono. Rencana kapasitas tampung fasilitas tersebut sebanyak 1.000 tempat tidur, dimana pada Tahap I telah dibangun fasilitas dengan daya tampung 360 tempat tidur.

Menurutnya Rumah sakit ini akan dipergunakan untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mudik ke tanah air, atau baru saja tiba di tanah air. Para TKI tersebut baik yang datang dari Malaysia, Singapura atau negara lainnya. Mereka akan menjalani proses karantina selama 14 hari terlebih dahulu, apabila positif akan menjalani masa perawatan di rumah sakit ini hingga dinyatakan sehat oleh dokter dan tenaga medis. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi daya tampung rumah sakit di daerah yang saat ini kewalahan dalam menangani ribuan TKI yang mudik ke Indonesia.

Saat ini personil yang siap bertugas adalah 247 orang yang terdiri dari dokter/tenaga medis/paramedis dan non medis yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Sukarelawan.

Sedangkan peralatan kesehatan dan perlengkapan gizi disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain itu, kelengkapan layanan pendukung yang tersedia seperti Ambulance (20 unit) dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polda Kepri, Pemkot Batam dan Pemprov Kepri. Selain itu juga telah disiapkan truk sebanyak 4 unit, minibus 4 unit, APD sebanyak 2.000 buah dukungan dari Dinkes Kepri, dan masker 5.000

buah dukungan dari Dinkes Kepri.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ditjen SDA juga telah merampungkan pekerjaan penyediaan infrastruktur air baku dan air bersih berupa pipa transmisi dari sumber air baku di Waduk Monggak Rempang menuju Embung Camp Vietnam sepanjang 13,85 Km. Pompa & genset telah terpasang & dilakukan uji coba distribusi ke Embung Camp Vietnam).

Embung Camp Vietnam juga telah diperluas dari semula 820 m² menjadi 6700 m² air sudah mengalir ke embung eksisting dengan debit ±8,3 liter/detik. Sementara untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 5 liter/detik bersumber dari Waduk Monggak Rempang dan *reservoir* kapasitas 50 m³ telah dilakukan uji coba.

Dikutip dari laman portal kompas.com, sejauh ini (15/04) terdapat 39 pasien positif (covid-19) yang merupakan anak buah kapal (ABK) milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), KM Kelud. Kedepan bila seluruh pandemi ini sudah menurun, rumah sakit ini akan digunakan sebagai pusat riset Indonesia. **(dri)**



KEMENTERIAN PUPR BEKERJASAMA DENGAN KEMENDIKBUD MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI CALON AHLI MUDA *FRESH GRADUATE* SARJANA DAN DIPLOMA

Oleh: Indri Eka Lestari

Sebanyak 870 orang dari 8 Perguruan Tinggi dan Politeknik seperti Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), ITENAS Bandung, STT Mandala Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Ahmad Yani (Unjani), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sekolah Tinggi Teknologi PLN (STT PLN) mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi Calon Ahli Muda *fresh graduate* Program Sarjana dan Diploma IV Bidang Jasa Konstruksi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Selasa (10/03) di Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok.





KEGIATAN rapat ini menjadi bentuk nyata kerjasama Pemerintah dengan stakeholder seperti Badan Usaha, lembaga, asosiasi, dan lembaga pendidikan maupun pelatihan, sekolah vokasi, perguruan tinggi dan masyarakat jasa konstruksi lainnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia bidang konstruksi di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam Pasal 70 yang mengamankan kewajiban kepada setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tantangan utama dalam infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan yang kompetitif Sumber Daya Manusia (SDM) sektor konstruksi. Industri Konstruksi membutuhkan SDM Bidang Jasa Konstruksi yang Kompeten untuk memenuhi *gap* tenaga kerja konstruksi

bersertifikat, dimana penyiapan SDM yang kompeten tersebut diperoleh salah satunya melalui jalur pendidikan, dalam hal ini *fresh graduate* Program Sarjana dan Diploma IV Bidang Jasa Konstruksi. Dimana berdasarkan data statistik Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia sebesar 8,3 Juta Orang. Dari jumlah tersebut hanya 9,4% atau lebih dibawah 10% tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasonkko Widiyanto dalam pembukaannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, dan seluruh tim yang terlibat guna menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini.

"Para calon-calon SDM konstruksi yang handal, profesional, dan





kompeten harus dipersiapkan sejak dini untuk siap terjun langsung di lapangan sekaligus menjawab semua tantangan sektor konstruksi Indonesia yang pelaksanaannya masih dilakukan. Hal ini juga menjadi tempat pembuktian bahwa SDM konstruksi Indonesia telah berkompeten dan ber-regenerasi dengan sangat baik.” Ujar Trisasongko.

Penyiapan Calon SDM Konstruksi lulusan Vokasional di tahun 2020 untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sebesar 48.000 Orang, meliputi calon lulusan SMK, Politeknik, dan Program Sarjana dan Diploma IV dengan jurusan vokasional. Untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten ditargetkan sebesar 6.985 Orang, adapun di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten sejak dimulai pada Minggu 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020, sudah terlaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi sebanyak 5.270 Orang, dengan rincian Uji Kompetensi dan Sertifikasi Calon lulusan SMK Bidang Konstruksi sebanyak 4.400 Orang (di 35 SMK di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten).

Para Peserta melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) hari atau sebanyak 32 Jam Pelajaran (JPL). Materi Pembekalan tersebut

merupakan usulan dari Industri Konstruksi Nasional (BUMN Karya dan Kontraktor serta Konsultan Swasta Nasional) yang meliputi pengenalan tentang Budaya Kerja, Regulasi Jasa Konstruksi, Metode Konstruksi, Pengendalian Biaya Konstruksi, Pengendalian Waktu, Pengendalian Mutu Konstruksi, serta teknologi Terkini seperti *Building Information Modelling (BIM)* serta pengenalan Alat-Alat Konstruksi terkini dalam pekerjaan konstruksi. Adapun untuk materi teknis dilaksanakan melalui Pelatihan mandiri dengan Aplikasi Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi (SIBIMA Konstruksi), yang merupakan syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi & Sertifikasi Ahli Muda *Fresh Graduate* Program Sarjana & Diploma IV Bidang Konstruksi.

menyampaikan bahwa Para peserta yang telah lulus Uji Kompetensi akan mendapatkan sertifikat ahli muda *fresh graduate* di bidang konstruksi yang berlaku selama satu tahun yang akan berguna saat mereka akan memasuki dunia kerja industri konstruksi nasional.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasional Kemendikbud Patdono Suwignjo mengatakan bahwa saat ini kunci menuju dunia kerja bukan hanya ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi. Kegiatan seperti ini sangat baik dilakukan oleh bidang-bidang lainnya agar para mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja memiliki jaminan tentang kompetensinya dan siap bekerja.

Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, dimana fokus pembangunan periode 2019-2024 adalah pembangunan SDM. Diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini SDM bidang konstruksi di Indonesia dapat menguasai pekerjaan konstruksi di dalam negeri yang saat ini masih menjadi prioritas pemerintah. Serta menjawab tantangan jasa konstruksi Indonesia yang mampu meningkatkan daya saing, mutu, dan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.



Upaya Peningkatan Pemanfaatan Mobile Training Unit Dalam Rangka Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng

"Prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik..."
(Presiden Joko Widodo, pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020, di Istana Bogor)



Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Bidang Tukang Bangunan Umum Dengan Menggunakan Mobile Training Unit.



Pembinaan Tenaga Konstruksi Terampil Bidang Kayu dengan Mobile Training Unit

ERA yang ditandai dengan pesatnya teknologi informasi dan tuntutan kompetensi yang mumpuni dalam berbagai sektor. Perkembangan teknologi pada masa ini mendorong pemerintah untuk semakin fokus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya pembangunan infrastruktur konektivitas yang menjadi prioritas, kini pembangunan sumber daya manusia juga menjadi program andalan pemerintah yang secara gamblang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 mendatang. Kutipan pidato presiden di atas mengingatkan kita bahwa pembangunan sumber daya manusia bukan prioritas yang main-main. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu andalan dalam agenda pembangunan Indonesia minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi senjata ampuh dalam memenangkan persaingan global.

Agenda pembangunan sumber daya manusia di negara kita memiliki tantangan mengingat saat ini berdasar data dari *Bussines World* peringkat daya saing sumber

daya manusia Indonesia berada pada rangking 45 dari 63 negara, masih kalah tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Peringkat yang tidak mudah untuk dikejar. Adanya bonus demografi serta pertambahan jumlah penduduk di usia produktif harus kita siasati semaksimal mungkin. Pembangunan infrastruktur yang begitu giat juga tidak akan dapat tercapai tanpa diimbangi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Masifnya pembangunan infrastruktur, percepatan dan pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pengembangan kawasan strategis dapat tercapai dengan lebih optimal bila dikerjakan oleh sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, agenda pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia ini adalah langkah yang tepat dalam menjawab tuntutan persaingan era ini.

Selain mengejar ketertinggalan, kita masih memiliki tantangan lainnya yaitu kondisi geografis negara kita yang terdiri dari berbagai pulau dan penduduk Indonesia



Peta Sebaran Mobile Training Unit di 34 Provinsi di Indonesia

yang tersebar di berbagai wilayah menjadikan pemerintah kesulitan untuk menjangkau dan memonitor kemampuan sumber daya manusia di tiap wilayah. Dengan tersebarnya populasi penduduk di tiap wilayah otomatis tenaga kerja juga ikut tersebar ke seluruh penjuru pulau. Tenaga kerja konstruksi khususnya yang tersebar hingga pelosok negeri inilah yang seringkali belum teredukasi oleh pemerintah setempat.

Dalam rangka membina tenaga kerja konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan alat bantu berupa mobil pelatihan keliling atau *Mobile Training Unit*. *Mobile Training Unit* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan dan mengetahui informasi terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Adanya *Mobile Training Unit* ini diharapkan dapat memperluas akses pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di pelosok yang belum terjangkau oleh lembaga pembinaan tenaga kerja konstruksi. *Mobile Training Unit* yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini dapat memberikan layanan berupa penyebaran informasi terkait pembinaan jasa

konstruksi, sosialisasi kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini telah memiliki 51 unit mobil pelatihan keliling yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan 6 jenis jabatan kerja yaitu bidang batu, bidang kayu, bidang pembesian, bidang *plumbing*, bidang elektrik, dan bidang pengelasan. *Mobile Training Unit* ini dirancang untuk lebih mudah dalam mobilisasi, sehingga pelayanan kegiatan *Mobile Training Unit* dapat dilaksanakan di lokasi atau *onsite*.

Hingga saat ini, *Mobile Training Unit* yang disebar ke 34 Provinsi telah membina tidak kurang dari 45.000 tenaga kerja konstruksi. Sebanyak 13.520 sumber daya manusia kita yang telah dilatih menggunakan fasilitas *Mobile Training Unit*. Apakah jumlah ini sudah cukup? Tentu saja belum. Angka ini tentunya masih jauh dari angka target tenaga kerja konstruksi berkompeten mengingat saat ini kurang dari 10% tenaga kerja konstruksi dinyatakan berkompeten.

Pemanfaatan *Mobile Training Unit* dinilai belum optimal lantaran

beberapa provinsi belum memiliki struktur organisasi perangkat daerah bidang jasa konstruksi sehingga program-program terkait jasa konstruksi belum dapat dilaksanakan, seperti pelatihan, bimbingan teknis, maupun uji kompetensi bagi para tenaga kerja terampil bidang konstruksi. Beberapa unit dinyatakan idle atau frekuensi pemanfaatannya cukup rendah akibat minimnya informasi terkait layanan *Mobile Training Unit* di daerah. Beberapa daerah belum memahami layanan apa saja yang bisa di dukung menggunakan *Mobile Training Unit*. Berbagai upaya saat ini sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan *Mobile Training Unit* agar dapat berperan dalam pelayanan pembinaan sumber daya manusia konstruksi khususnya di pelosok atau kawasan pedesaan. Disamping berupaya mendorong terbentuknya unit pembina jasa konstruksi di daerah, upaya lain siap digiatkan kembali.

Sosialisasi terhadap program-program yang bisa dilayani dengan *Mobile Training Unit* perlu dilakukan agar unit ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyebarluasan informasi

seharusnya tidak terpaku pada sosialisasi resmi dalam ruangan secara formal, namun juga memanfaatkan acara-acara kedaerahan atau acara hari ulang tahun daerah. Jargon atau branding terhadap *Mobile Training Unit* perlu disuarakan kembali agar unit ini beserta layanannya memiliki identitas dan dapat dikenali. Ketika kita menyebut jargon tersebut, secara langsung *Mobile Training Unit* ini dapat dikenali oleh berbagai kalangan. Jargon atau identitas ini juga dapat menggambarkan program layanan dalam bidang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Hingga saat ini *Mobile Training Unit* digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota. Tidak menutup kemungkinan, dengan adanya sosialisasi ke berbagai pihak, *Mobile Training Unit* ini digunakan oleh dinas atau lembaga lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 8 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub urusan jasa konstruksi salah satunya adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Peraturan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pemanfaatan *Mobile Training Unit* untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tingkat terampil.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan sumber daya manusia konstruksi dengan memanfaatkan fasilitas *Mobile Training Unit*, seperti bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Sekolah kejuruan, Vokasi, Universitas, atau dengan lembaga pembina masyarakat di tingkat desa/ kelurahan penting dilakukan. Sangat mungkin sekali, dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa *Mobile Training Unit* ini akan benar-benar bergerak ke pelosok desa untuk

melatih tenaga terampil di pedesaan. Sangat terbuka kemungkinan untuk bekerjasama dengan pemerintah desa mengingat saat ini pemerintah desa memiliki anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pembinaan masyarakat. Penyebaran informasi terkait layanan *Mobile Training Unit* seluas mungkin dapat membuka peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka pembinaan tenaga terampil.

Peningkatan pemanfaatan *Mobile Training Unit* juga dapat dilakukan dengan mengembangkan jabatan kerja. Saat ini jabatan kerja yang dapat didukung dengan *Mobile Training Unit* adalah bidang batu, bidang kayu, bidang pembesian, bidang *plumbing*, bidang elektrikal, dan bidang pengelasan. Hal ini perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini atau jabatan kerja yang saat ini sedang banyak diminati. Adanya jabatan kerja yang lebih update dan mengikuti kebutuhan pasar ini juga perlu disosialisasikan sehingga masyarakat dapat terdorong untuk mempelajari jabatan kerja tersebut.

Pemanfaatan *Mobile Training Unit* yang belum maksimal di daerah juga disebabkan oleh minimnya sumber daya pelaksana pelatihan *Mobile Training Unit*. Minimnya instruktur, pengelola, dan *assesor* di daerah menjadi salah satu alasan mengapa pelatihan terampil dengan fasilitas *Mobile Training Unit* tidak dilakukan. Keterbatasan jumlah instruktur, pengelola dan *assesor* seperti ini dapat diantisipasi dengan menyelenggarakan pelatihan bidang keinstrukturan, *assesor*, dan pengelola *Mobile Training Unit*. Penyelenggaraan pelatihan kepada para calon instruktur, *assesor*, dan pengelola ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat petugas *Mobile Training Unit*. Selain kelengkapan unit,

kelengkapan modul juga perlu dilengkapi. Modul-modul pembinaan tenaga terampil terkait jabatan kerja pada *Mobile Training Unit* juga perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan dengan standar yang berlaku saat ini. Hal ini perlu dipersiapkan sehingga ketika akan dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap tenaga terampil, unit beserta petugasnya telah siap. Berbicara mengenai *Mobile Training Unit* tidak hanya berbicara pada unit mobil dan peralatan secara harafiah semata, namun terlebih pada fungsi petugasnya sehingga perlu dilengkapi secara menyeluruh.

Mobile Training Unit adalah salah satu alat bantu dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Masih banyak perangkat lain yang dapat dijadikan alat bantu untuk mendukung kegiatan peningkatan kompetensi tenaga terampil kita. Berbagai alat bantu dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin agar peningkatan kompetensi kita dapat tercapai. Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah keniscayaan yang nantinya dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur bangsa.

Membangun manusia adalah sebuah investasi jangka panjang untuk menghadapi masa depan. Tagline "SDM Unggul Indonesia Maju" barangkali bukan hal yang mustahil lagi jika diiringi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan *stakeholder*. Dengan potensi dan komitmen yang tinggi dari pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia dapat diwujudkan bersama secara kongkret melalui dukungan program dan kebijakan terhadap peningkatan tenaga kerja kita. Dengan dukungan dari berbagai pihak inilah, sejatinya kita saat ini sedang melangkah mewujudkan Indonesia seperti yang telah dicita-citakan oleh pemimpin kita.

KUNCI MENANGKAN PERSAINGAN : **LEBIH BAIK, LEBIH MURAH DAN LEBIH CEPAT**

Oleh: Subbag Komunikasi Publik



Peningkatan Penggunaan Produk-Produk Dalam Negeri, Industri Konstruksi Nasional juga harus di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

PENINGKATAN pembangunan infrastruktur menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku konstruksi termasuk pemasok material dan peralatan konstruksi. Sebab kebutuhan material peralatan akan sangat meningkat, namun bisa menjadi tantangan jika pemasok dalam negeri tidak sanggup dan justru beralih ke pemasok dari luar negeri.

“Untuk itulah harus kita siapkan dengan matang *supply chain* konstruksi terutama material dan peralatan, supaya bisa menang persaingan”, demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada kegiatan *Plant Visit* dan *Sharing Knowledge* tentang Teknologi Cat dan Aplikasinya ke PT Propan Raya, di Curug, Tanggerang, Banten.

Selain peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, industri konstruksi Nasional juga perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sehingga dapat mewujudkan produk-produk konstruksi Nasional yang berkualitas dan sesuai kaedah standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4).

Untuk itu pemerintah melaksanakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja terampil dalam menggunakan material seperti adanya jabatan kerja keahlian tenaga terampil mengecat. Hal tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sekaligus harus mulai menerapkan teknologi yang semakin berkembang dan meninggalkan cara konvensional yang dianggap sudah tidak efisien.

“Pemerintah dan masyarakat konstruksi tidak hanya menyiapkan materialnya saja, tetapi juga harus menyiapkan SDM-nya, apalagi di Ibu Kota Negara (IKN) nanti semua sektor akan menggunakan teknologi”, tambah Dirjen Bina Konstruksi.

Untuk pembangunan IKN, pemerintah hanya menggelontorkan dana sebesar 19,2% saja, sisanya akan diberikan kepada masyarakat untuk dapat berinvestasi. Semua peraturan di Indonesia yang menghambat investasi pun mulai dihapuskan, artinya investasi material pun akan lebih mudah berkembang. Terutama dengan material yang komponen dalam negerinya sampai 70%, tentunya harus lebih diterima

dipasaran, dengan membuktikan bahwa material tersebut lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Hanya dengan demikian persaingan dapat dimenangkan dari pelaku asing.

“Berapa besarpun dana yang dialokasikan kalau kita tidak siap dengan konsep *supply chain* konstruksi maka pastilah SDM, material, peralatan maupun teknologi semua akan diambil alih oleh luar”, tegas Dirjen Bina Konstruksi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

penerapan teknologi pelapisan yang ramah lingkungan di lingkungan Kementerian PUPR. Hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan, dan Balai Material dan Peralatan Konstruksi.



Hambatan dan Tantangan dalam Pembinaan Jasa Konstruksi bagi Pemerintah Daerah

Oleh: Sutjipto

Jafung Madya Bidang Konstruksi 2020

(PART II)

Keberadaan jasa konstruksi dalam tatanan organisasi perangkat daerah boleh dikatakan baru.

HAL INI disebabkan desakan Kementerian Pekerjaan Umum ketika menempatkan pembinaan bidang jasa konstruksi untuk menjadi suatu bidang dalam struktural pemerintahan daerah di bawah dinas pekerjaan umum baik di provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, pasal 17 ayat 2 bahwa dinas pekerjaan umum terdiri dari 5 bidang yaitu sektor Sumber Daya Air, sektor Cipta Karya, sektor Bina Marga, sektor Bina Konstruksi, dan Sektor Tata Ruang.

Bahwa untuk mewujudkan Sektor bina konstruksi dalam dinas pekerjaan umum memang agak sulit, karena disamping beban tugas yang menjadi standar dalam pengukuran untuk menjadi bidang, seksi harus memiliki nilai indikator yang diukur dari rentang tugas berdasarkan hasil pemetaan kegiatan yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, sehingga banyak daerah yang tidak bisa memberikan data, tentunya akan sangat sulit untuk dibuatkan suatu bidang apalagi kasi dalam struktur dinas pu beban tugasnya tidak bisa diukur.

Untuk itu akan sulit sekali bidang jasa konstruksi dalam mendapat porsi lebih, karena berdasarkan data, beban kerja dan hasil yang sudah dicapai daerah dalam pembinaan jasa konstruksi tidak pernah dilakukan. Hal ini karena pembinaan jasa konstruksi masih ditangani oleh pemerintah pusat, dan pembinaan jasa konstruksi di pusat dilimpahkan pada suatu Badan Pembinaan Jasa Konstruksi pada salah satu eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum pada waktu itu, lalu daerah hanya dapat pembinaan sebagai mitra dengan membentuk tim pembinaan jasa konstruksi (TPJK) di bawah biro pembangunan sebagai mitra koordinasi di daerah dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kalau saja hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum diberikan kepada semua daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota maka dalam pembentukan OPD khususnya bidang jasa konstruksi memiliki data terkait pembinaan yang telah ada dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, maka tidak akan sulit untuk mendapatkan bidang jasa konstruksi di dinas pekerjaan umum terkait pasal 17 ayat 2 dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang turunan undang-undang 23 tahun 2014 tersebut.

Kondisi Saat ini bidang jasa konstruksi pada nomenklatur dinas pekerjaan umum di daerah provinsi dari 34 provinsi yang telah terbentuk bidang jasa konstruksinya sejumlah

29 provinsi dan 5 provinsi belum memiliki bidang jasa konstruksi lalu dari 512.000 kabupaten/kota yang telah memiliki bidang jasa konstruksi sekitar 300.000 kabupaten/kota dan yang belum terbentuk bidang jasa konstruksinya berjumlah 212.000.

Dari jumlah yang sudah terbentuk bidang jasa konstruksinya, secara keseluruhan masih sangat sedikit yang sudah memiliki kegiatan dengan pendanaan yang tidak signifikan terkait tugas dan fungsi bidang jasa konstruksi yang sangat banyak tersebut. Sehingga jasa konstruksi yang konon telah ditentukan oleh 2 (dua) Undang-undang masih mengalami hambatan dan nyaris tidak tertangani, mengapa demikian adanya, hal ini ada beberapa kendala antara lain :

1. Kencendrungan daerah lebih memperhatikan kegiatan berbentuk bidang ABC sehingga urusan bidang jakons masih dipandang urusan yang belum begitu penting
2. Pejabat yang ada belum banyak mengetahui terkait tugas fungsi dari bidang jasa konstruksi yang sangat begitu banyak dan dapat mempengaruhi terkait pelaksanaan bidang lainnya seperti bidang ABC tersebut.
3. Kepentingan Lembaga lain seperti DPRD belum bisa memahami tugas dan fungsi dari bidang jakon sehingga sulit untuk mendapat dukungan dari DPRD terkait program dan penganggaran bidang jakons
4. Pelaksana bidang jakons belum banyak mengerti tugas dan fungsi untuk diterjemahkan kedalam tugas dan kegiatan
5. Belum ada regulasi pendukung lainnya terkait tugas konkuren untuk pemerintah daerah sebagai penguat dalam membuat program dan penganggaran

6. Masih sedikit pembinaan dan pemberdayaan untuk pendampingan bagi pemerintah daerah dari pemerintah pusat terutama dari direktorat jenderal bina konstruksi.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa kalau tidak ditangani segera oleh pemerintah pusat dan tentunya juga dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR dan Lembaga lainnya maka pembinaan jasa konstruksi akan tetap berjalan ditempat dan lambat, hal ini akan sangat merugikan stakeholder jasa konstruksi yang ada di daerah-daerah karena selain tidak memiliki ketentuan Undang-undang yang ada, juga tidak bisa berdaya saing untuk berkompetitif di negara sendiri apalagi di negara lain.

Optimalisasi untuk pembinaan jasa konstruksi harus segera dilakukan secara simultan baik oleh pemerintah pusat Bersama pemerintah daerah, untuk selalu menerapkan peraturan yang ada disamping pula melakukan pemberdayaan secara nyata dan tuntas baik melakukan percepatan maupun melakukan pendampingan secara terus menerus, tentunya juga mempercepat regulasi-regulasi yang memberikan efek jera berupa sanksi yang tidak melakukan dan mengimplementasikan aturan tersebut secara tegas dan lugas .

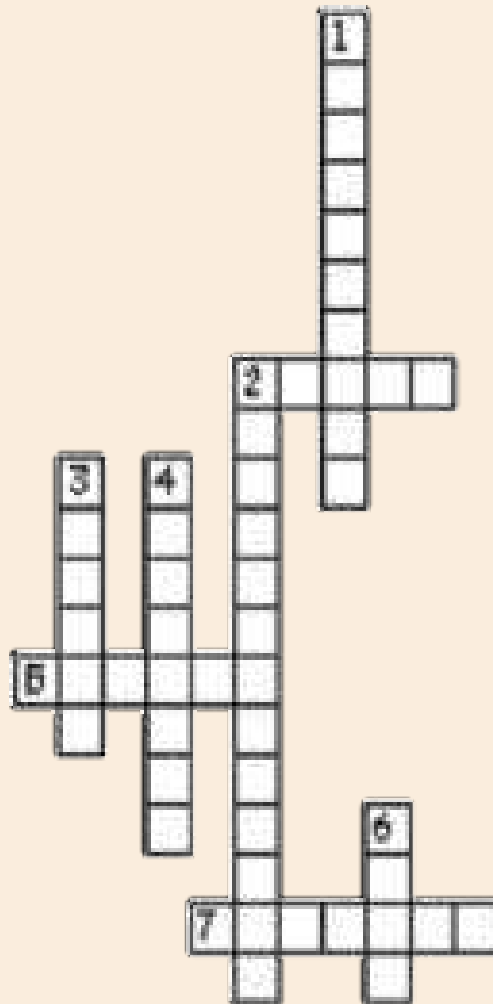
Bahwa sudah hampir 5 Tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengaturan pemerintah daerah beserta peraturannya dan hampir 3 tahun Undang-undang nomor 2 tahun 2017, yang semuanya ada pengaturan terkait pembinaan jasa konstruksi, mestinya telah dilaksanakan dengan baik dan bisa dirasakan manfaat dari pengaturan tersebut baik bagi pemerintah maupun masyarakat jasa konstruksi

itu sendiri, namun kenyataan belum sepenuhnya bisa dirasakan dan bahkan malah pembinaan tersebut tidak ada di daerah seakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Oleh karena itu perlu upaya penanganan bersama agar apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut bisa dilaksanakan dengan baik tentunya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan antara lain :

1. Pemerintah pusat segera membuat peraturan turunan dari undang-undang segera disosialisasikan penerapannya .
2. Mendorong pemerintah daerah, sebelum terbitnya peraturan undang-undang pembinaan jasa konstruksi terbit dengan membuat pengaturan Gubernur atau Bupati untuk hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Melakukan pendampingan kepada daerah untuk menyusun program kerja dan kegiatan serta penganggaran, serta bagaimana bisa mendampingi pemerintah daerah cq. Bagian Jakons dalam menyampaikan penjelasan kepada DPRD atau urusan program lainnya di daerah
4. Pemerintah pusat lebih memperbanyak piloting kegiatan kepada pemerintah daerah terkait pembinaan jasa konstruksi melalui pola kerjasama pembiayaan kepada stakeholder di daerahnya.
5. Percepatan penerapan sanksi bagi penyelenggaraan konstruksi untuk yang melanggar aturan
6. Pembentukan tim pengawas penyelenggaraan konstruksi untuk tertib penyelenggaraan konstruksi baik di provinsi maupun kabupaten/kota

GAMES



Mendatar

2. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.
5. Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.
7. Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising

Menurun

1. Sepatu yang didesain khusus untuk pekerja yang berada di area basah (becek atau berlumpur). Kebanyakan sepatu karet di lapiasi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
2. Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan.
3. Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb)
4. Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas)
6. Berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja/berada di atas ketinggian.





Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un

SEGENAP PIMPINAN DAN STAF KEMENTERIAN PUPR BERDUKACITA YANG SEDALAM-DALAMNYA ATAS WAFATNYA DUA PUTRA TERBAIK KEMENTERIAN PUPR.

PERTAMA, H. ARSIDIN RAHMAN, KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (PJN) 3, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJN) XIII MAKASSAR, DITJEN BINA MARGA

KEDUA, M IRFAN SATIAKSA FAUZIE ST, KASUBBAG TU BALAI PELAKSANAAN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP₂JK) WILAYAH LAMPUNG, DITJEN BINA KONSTRUKSI.

KEMENTERIAN PUPR MENGUCAPKAN PENGHARGAAN DAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS KERJAKERAS DAN DEDIKASI ALMARHUM BERDUA SELAMA BERTUGAS.

TERIRING DO'A SEMOGA KEDUA ALMARHUM HUSNUL KHOTIMAH DAN KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERIKAN KETABAHAN DAN KEIKHLASAN. AAMIIN YA RABBAL ALAMIEN.

@KemenPUPR
@ditjenbinakonstruksi
@info_binamarga

Innalillahi Wa Innaillaihi Roji'un

Keluarga Besar BP2IK Wilayah Lampung
Mengucapkan

Turut Berdukacita Atas Wafatnya

M. Irfan Satiakya Fauzie, S.T

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan dosa
Semoga amal baik dan ibadah diterima Allah SWT



Keluarga Besar BPPIN XIII Makassar
Mengucapkan

Turut Berdukacita Atas Wafatnya

Dr. Arsidin

(Kapala Jurusan Kerja BP/PP, BP Samar)

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan dosa
Semoga amal baik dan ibadah diterima Allah SWT

